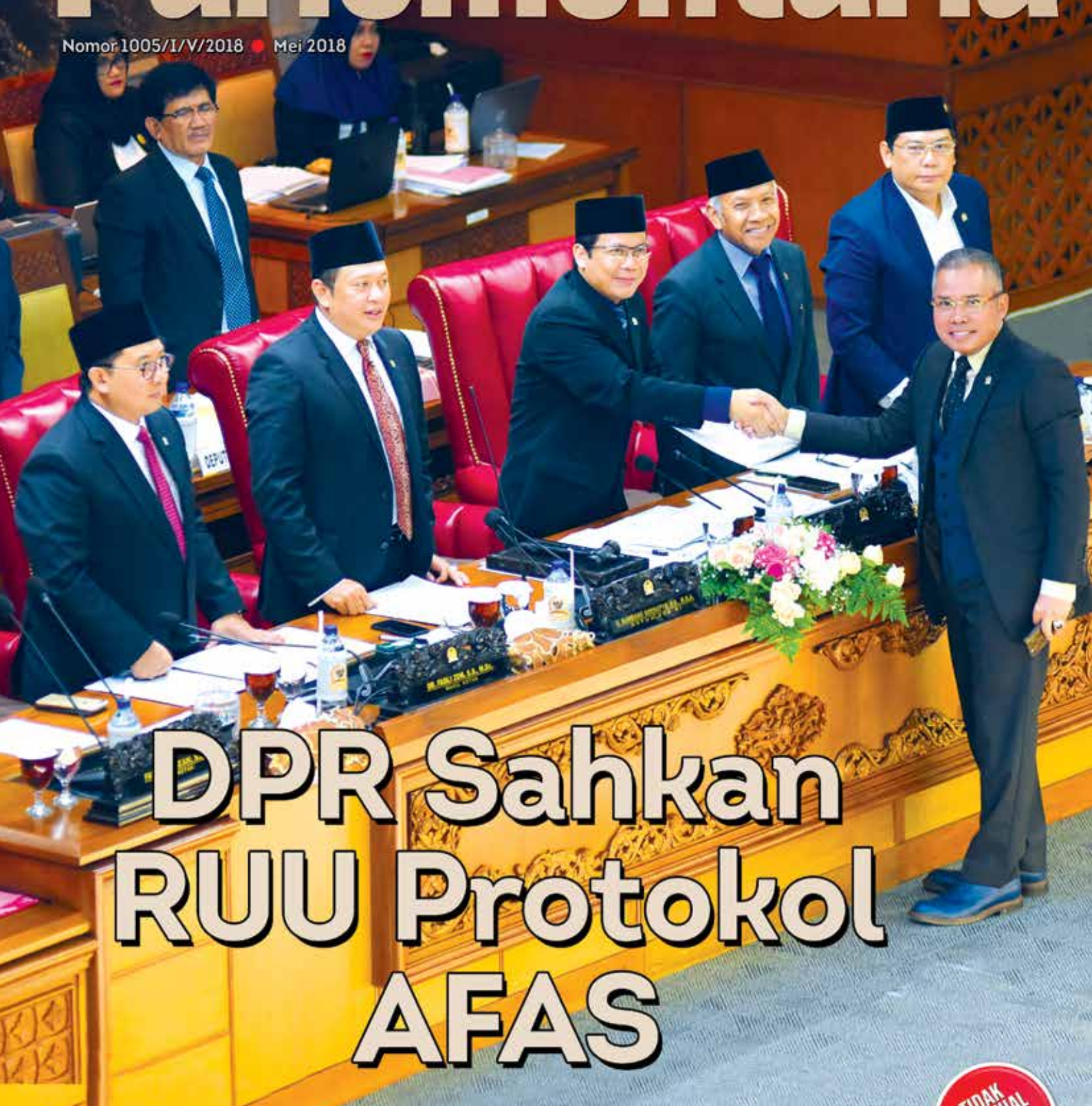




Buletin Parlementaria

Nomor 1005/1/V/2018 • Mei 2018



DPR Sahkan RUU Protokol AFAS



Penguatan BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat





Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Pimpinan DPR RI menerima pandangan akhir RUU AFAS dari pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan

DPR Sahkan RUU Protokol AFAS

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan *Protocol To Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Service* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) atau RUU AFAS menjadi Undang-Undang.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai memimpin jalannya Rapat Paripurna mengatakan, dengan adanya UU AFAS ini dapat menjadi landasan hukum bagi bank dalam negeri untuk melakukan ekspansi ke negeri tetangga di kawasan ASEAN, dan mendorong iklim kompetisi sehat dalam industri perbankan. Namun Taufik mengingatkan, pemerintah juga harus mencermati potensi dominasi asing di sektor perbankan.

“Pemerintah harus memastikan perbankan kita siap melakukan ekspansi ke luar negeri. Jangan sampai ketika perbankan kita tidak siap, justru perbankan asing masuk dan mendominasi perbankan nasional. Selain itu, pemerintah



juga harus memastikan manfaat aturan ini bisa dirasakan dan memastikan perjanjian yang ada bisa diimplementasikan di seluruh negara yang meratifikasi,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Politisi Partai Amanat Nasional itu juga meminta pemerintah memastikan tidak ada peraturan ganda yang diterapkan di setiap negara mitra, yang dapat menghambat perbankan domestik untuk melakukan ekspansi di luar negeri. Ia menekankan, Indonesia harus benar-benar mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan disetujuinya UU AFAS ini.

Dalam laporannya dihadapan Anggota Dewan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Achmad Hafisz Tohir berharap dengan adanya UU AFAS ini, akan memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara, serta pelaku sektor jasa keuangan untuk melaksanakan Protokol dimaksud dan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Keuntungan itu, kata Hafisz antara lain terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sektor lain, meningkatnya daya saing sektor jasa keuangan nasional, adanya peluang untuk memperluas pasar sektor jasa keuangan di kawasan ASEAN, serta mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antar pihak.

“Dalam pembahasan tingkat pertama mengenai pandangan fraksi-fraksi, 8 fraksi menyetujui, sementara 2 fraksi setuju dengan catatan. Sedangkan dalam pandangan akhir mininya, pemerintah berkomitmen secara sungguh-sungguh melaksanakan semua catatan yang diberikan pada saat implementasi Protokol ke-6 AFAS itu,” jelas Hafisz.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan UU AFAS merupakan tahapan kerja sama pembukaan akses pasar jasa keuangan ASEAN yang diyakini mampu menjaga kepentingan Republik Indonesia, khususnya industri jasa keuangan untuk menciptakan kemakmuran bagi Bangsa Indonesia.

Dengan adanya UU AFAS ini juga membuka kesempatan bagi pelaku perbankan nasional untuk melakukan ekspansi operasi ke pasar ASEAN. Saat ini menurutnya masih sangat sedikit perbankan nasional yang memiliki kantor cabang atau unit usaha di luar negeri. Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya penetrasi perbankan di pasar global adalah berbagai ketentuan dan persyaratan yang dipandang menyulitkan.

“Kami yakini UU AFAS ini akan meningkatkan daya saing penyedia jasa keuangan domestik, mendorong pertumbuhan industri keuangan yang pada akhirnya akan memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia,” harap Menkeu Sri Mulyani. **sf,rnm**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldidi Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

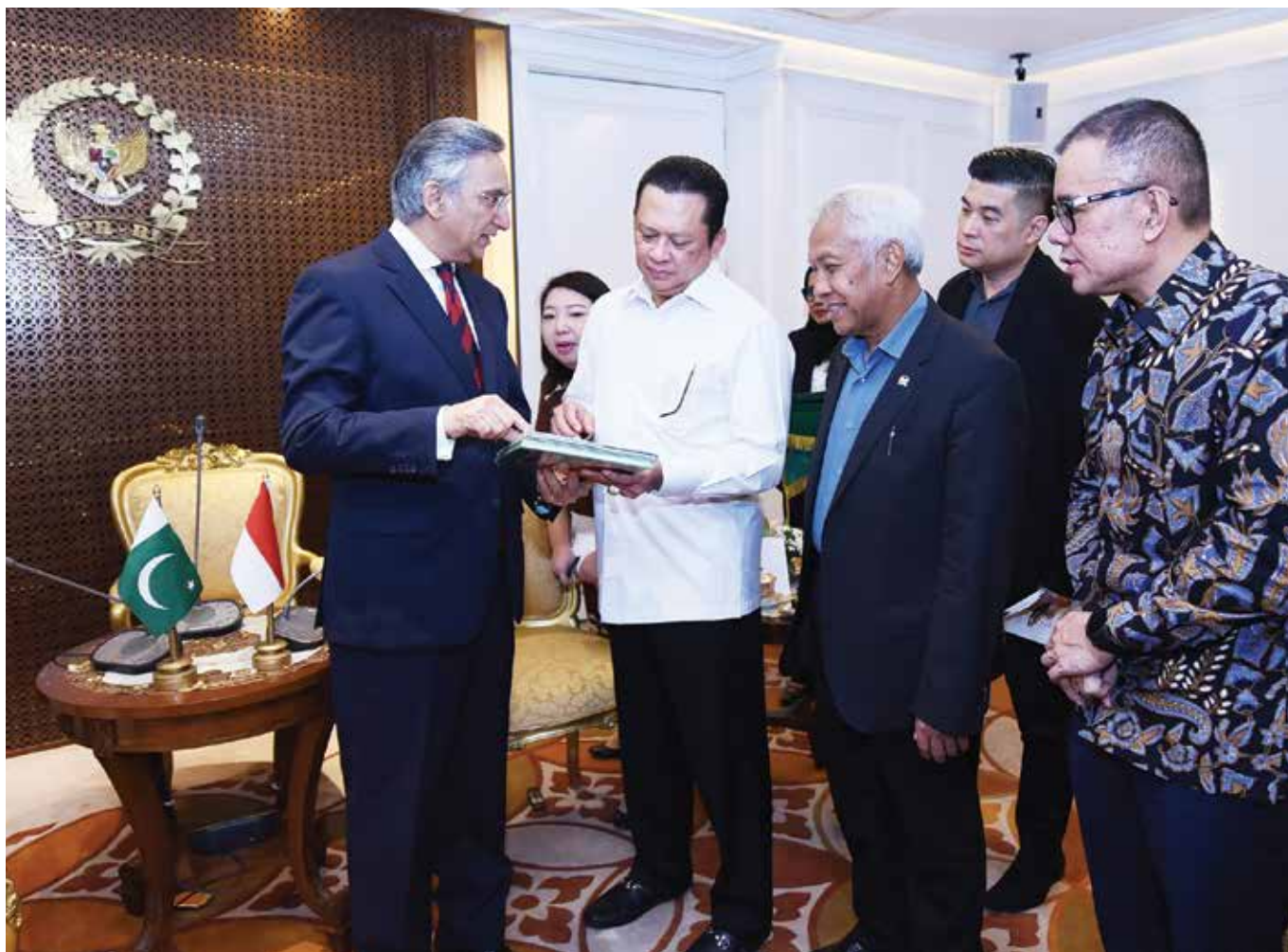
Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H. E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja

Foto: Jaka/hr

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Pakistan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan Pakistan pada Januari 2018 lalu, dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan, disepakati peningkatan kerja sama di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik, dan kerja sama protokol.

“ Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Bamsoet menuturkan, Pakistan sebagai negara Republik Islam mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia. Sebagai bagian dari masyarakat

internasional, Indonesia dan Pakistan punya peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional.

“Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan. Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka dan India. Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga mengapresiasi



meningkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan. Tahun 2015 nilai perdagangan kedua negara tercatat 2,164 miliar dolar AS. Di tahun 2016, meningkat menjadi 2,175 miliar dolar AS. Dan, pada tahun lalu melonjak mencapai 2,639 miliar dolar AS.

“Melalui 4 MoU yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Pakistan di Islamabad pada Januari 2018 lalu, saya yakin nilai perdagangan kedua negara akan melonjak signifikan di tahun 2018 ini,” harap politisi Partai Golkar itu.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta Dubes Pakistan tidak hanya memperkuat hubungan kedua negara di tingkat bilateral saja. Hubungan di tingkat multilateral pun, seperti forum D-8, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, serta di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu ditingkatkan lagi. Karena itu, DPR RI akan mendukung Pakistan untuk mendapatkan status *observer* di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

“DPR RI akan memberikan dukungan bagi Pakistan untuk menjadi *observer* di AIPA. Status tersebut akan memperkuat babak baru hubungan Pakistan dengan parlemen di negara-negara ASEAN. Kami juga berharap pemerintah Pakistan mendukung pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020,” ujar Bamsuet.

Bamsuet mengaku memahami kondisi dalam negeri Pakistan yang masih menghadapi sengketa perbatasan wilayah dengan India di wilayah Jammu Kashmir. Dunia internasional melaporkan, setidaknya Pakistan dan India sudah tiga kali terlibat perang yang menimbulkan banyak korban jiwa.

“Kami menghormati sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India. Sebagai sahabat, kami berharap sengketa perbatasan ini bisa segera diselesaikan dengan damai dan sesegera mungkin. Jika membutuhkan pihak ketiga sebagai jembatan diplomasi, Indonesia maupun negara lain di anggota OKI dan PBB, tentu dengan senang hati akan membantu,” pungkas Bamsuet.

Turut mendampingi Bamsuet dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, dan Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan. Sedangkan H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem datang bersama Wakil Ketua bidang Politik Kedubes Pakistan Sahid Razha. ■ *hs/sf*

Taufik Kurniawan Minta Aparat Sidak Sumur Minyak Tradisional

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta aparat dan pihak berwenang untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) sumur minyak tradisional yang dijalankan oleh masyarakat. Pasalnya, jika terjadi insiden seperti ledakan atau kebakaran, tentu akan sangat membahayakan, baik itu penambang maupun masyarakat.

Hal ini dikatakannya menyusul terjadinya kebakaran sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Rabu (25/4), sekitar pukul 01.30 WIB. Akibat insiden ini, dilaporkan 10 warga tewas, 19 warga luka-luka, dan sedikitnya lima rumah terbakar.

“Aparat dan pihak berwenang harus melakukan sidak ke sumur minyak rakyat yang di luar ketentuan perundang-undangan. Bukan hanya di Aceh timur, tapi seluruh sumur minyak ditertibkan. Karena ini sangat berbahaya, manakala terjadi potensi kebakaran dan ledakan yang menggunakan teknologi tradisional,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Politisi PAN itu menegaskan, kendati Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun sumur minyak tradisional ini dijalankan oleh masyarakat, dan tidak dikuasai oleh institusi resmi. Sehingga, sumur minyak tradisional ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

“Sumur minyak tradisional ini harus diatur. Karena ini kan sumur minyak milik rakyat, bukan milik institusi resmi. Secara prinsip, kita mengharapkan, jangan kita *kelabakan* karena ada kebakaran sumur minyak milik masyarakat yang tidak berizin. Tapi pencegahannya harus dilakukan secara sistematis juga,” tandas Taufik.

Sebelumnya telah terjadi kebakaran sumur minyak di Desa Pasi Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Rabu (25/4) sekitar pukul 01.30 WIB. Dilaporkan, 10 warga tewas, 19 warga luka-luka, dan sedikitnya lima rumah terbakar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur melaporkan, peristiwa itu berawal saat sebuah sumur minyak di lahan Zainabah meledak. Peristiwa ini diduga karena ada sekelompok pencari minyak mentah ingin mengambil minyak yang tidak tertampung. Namun, belum diketahui penyebab pasti terbakarnya lahan minyak tersebut. ■ *sf*



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Rumi/hr



Foto: Oji/hr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Pimpinan Komisi X DPR RI berdialog dengan peserta Festival dan Diskusi Teh, Kopi, dan Coklat Produk Petani Indonesia

Kopi, Teh dan Coklat Indonesia Harus Mendunia

Produksi kopi dan teh termasuk coklat (kakao) Indonesia harus kembali mendunia. Dahulu, kopi dan teh Indonesia merajai pasar ekspor dunia. Kini, ekspornya merosot tajam. Ini harus jadi perhatian semua pihak, terutama otoritas pertanian Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberi sambutan sekaligus membuka Festival dan Diskusi Teh, Kopi, dan Coklat Produk Petani Indonesia mengatakan, keberpihakan kepada para petani harus dilakukan untuk mengembalikan kejayaan tiga produk tersebut. Festival ini sekaligus menggugah perhatian semua komponen bangsa untuk kembali meningkatkan produksi kopi, teh, dan coklat nasional.

“Kopi, teh, dan coklat telah lama menjadi produk unggulan sektor pertanian kita. Ketiganya merupakan komoditas

primadona ekspor Indonesia yang sudah diakui dunia. Teh, kopi, dan kakao yang dihasilkan oleh para petani Indonesia memiliki kekhasan dan keunggulan yang membedakan dengan hasil produksi negara lain,” ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Festival ini selain dihadiri produsen kopi, teh, dan coklat, juga dihadiri sejumlah duta besar negara-negara sahabat di Jakarta. Setidaknya ada delapan produsen teh, sepuluh produsen kopi, dan dua produsen coklat yang ikut serta dalam festival ini. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ikut mendukung festival

yang digelar di Lobi Gedung Nusantara DPR RI itu. Festival ini berlangsung selama 25-27 April 2018.

Fadli mengungkapkan, dilihat dari aspek ekonomis, kinerja ekspor ketiga komoditas ini bisa dikatakan berkontribusi signifikan terhadap devisa. Data Kementerian Pertanian menyebutkan, tahun 2016 ekspor kopi mencapai 414.651 ton dengan nilai 1,55 juta dolar AS.

Sementara teh mencapai 330.029 ton dengan nilai 113,1 juta dolar AS. Sedangkan kakao mengekspor 51.317 ton dengan nilai 113 juta dolar AS. Dengan fakta itu, kini kopi Indonesia menempati urutan keempat dunia. Sedangkan teh dan coklat Indonesia masing-masing menempati urutan ketujuh dan ketiga dunia.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan mutu dan penjualan ketiga komoditas tersebut. Ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani, pengusaha, asosiasi, dan juga lembaga pemerintah,” tutup Fadli dalam sambutannya. ■ mh/sf



Kebijakan Afirmatif Pemerintah Ditunggu Ojek Online

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menegaskan, kebijakan afirmatif pemerintah terkait regulasi transportasi daring (online) sangat ditunggu masyarakat, khususnya pengemudi ojek online.

Hal itu ia ungkapkan usai beraudiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) dan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

“Sebenarnya ini persoalan lama, kita ingin adanya kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah tidak bisa menutup mata, tidak boleh diam karena ini sudah bergulir selama 3 tahun,” ungkap Fary.

Anggota Dewan Fraksi Gerindra itu mengatakan, sebagai tindak lanjut audiensi tersebut, Komisi V segera menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Rapat tersebut akan membahas tuntutan dari para driver ojek online.

“Saya kira pelaku dan pemerhati tegas meminta kejelasan dari pemerintah, karena mereka merasa dimanfaatkan aplikasi. Kita juga akan undang aplikasi, apakah pemerintah mau diam saja, ini bukan persoalan baru loh, sudah 3 tahun

selalu disampaikan,” kritisnya.

Menurut Fary, setidaknya ada tiga tuntutan para pengemudi ojek online yang disampaikan. Pertama, perlindungan atau payung hukum bagi ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi publik.

Kedua, adanya rasionalisasi tarif atau penetapan standar tarif bawah sebesar Rp3.000 - Rp4.000 per kilometer dengan metode subsidi dari perusahaan aplikasi. Ketiga, status yang jelas bagi driver ojek online, apakah sebagai mitra atau pekerja, karena selama ini driver transportasi daring merasa dieksploitasi.

“Kami dipaksa ambil semua orderan yang masuk, padahal kami ini mitra bukan pekerja,” salah satu ujar perwakilan FPTOI yang juga sebagai pelaku ojek online, Krisna. Krisna juga mengeluhkan, selama ini para pengemudi ojek berbasis aplikasi tidak pernah dilibatkan dalam menentukan tarif. Aplikasi dinilai sering mengeluarkan kebijakan sepihak tanpa melibatkan driver.

Sementara itu, salah satu driver

ojek online, Ahmad Syafii mengatakan, legalisasi menjadi penting karena akan menjadi pintu masuk aturan main yang jelas dan mengikat. Mereka juga menuntut adanya perlindungan hukum sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri.

“Ini menjadi dilema buat kami, karena di satu sisi kami perlu beroperasi secara legal dan di sisi lain aplikasi tidak mau melegalkan usaha mereka. Negara harus hadir dalam mengatur masalah ini, karena faktanya negara juga hadir mengambil keuntungan dari bisnis ini. Insentif kami dipotong 6 persen, tapi kok mereka seolah lepas tangan. Kami hanya ingin keberadaan kami diakui dan hidup dengan aturan yang mengikat,” imbuhnya.

Sebelumnya, FPTOI termasuk driver ojek online telah melakukan dua kali aksi damai, yakni pada tanggal 23 November 2017 dan 27 Maret 2017. Namun, kedua aksi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan dan aksi nyata pemerintah.

Pada aksi kedua, perwakilan massa termasuk driver ojek online telah bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo, tetapi hingga saat ini juga belum membuahkan hasil berupa payung hukum serta kenaikan tarif ojek online.

Usai melakukan audiensi, Fary didampingi Anggota Komisi V lainnya, diantaranya Bambang Haryo Soekartono dan Nur Yasin menemui pengemudi ojek online yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI sejak siang hari.

■ ann/sf



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan Anggota Komisi V DPR RI foto bersama usai audiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) dan Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) di Gedung DPR RI



Foto: Tiara/hr

Tim Panja Bawang Putih Komisi IV DPR RI dipimpin Rahmad Handoyo bersama petani bawang putih di Desa Glapansari, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah

Indonesia Tak Boleh Tergadai Impor Bawang Putih

Bangsa Indonesia tidak boleh tergadaikan oleh kebijakan impor pangan, khususnya komoditas bawang putih. Pasalnya, 95 persen kebutuhan bawang putih dalam negeri berasal dari impor. Sementara, 5 persen sisa kebutuhan berasal dari petani bawang putih dalam negeri.

Demikian diutarakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Bawang Putih Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo usai memimpin pertemuan panja dengan jajaran Dinas Pertanian, PT. Pupuk Indonesia serta sejumlah petani bawang putih di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (19/4).

“Hal ini sangat disayangkan. Padahal dari segi infrastruktur, lahan, suhu udara, kita semua punya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita bergantung pada impor bawang putih. Bangsa Indonesia harus bisa mengulang kesuksesan swasembada bawang putih seperti pada tahun 1993,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Rahmad meyakini hal tersebut

terjadi dikarenakan adanya kesalahan pengurusan tata niaga impor bawang putih. “Kondisi ini tentunya akan kami upayakan untuk dikembalikan secara perlahan. Saya optimis seperti target pemerintah yakni swasembada pangan, khususnya bawang putih di tahun 2021 pasti terwujud,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, politisi dapil Jawa Tengah V itu menyarankan melalui Komisi IV DPR RI agar menaikkan kebijakan wajib tanam importir bawang putih yang sebelumnya hanya sebesar 5 persen, menjadi 20 persen dari kuota impor.

“Jika importir tidak sanggup dan tidak mau, ya kami persilahkan *minggir*. Kita serahkan sepenuhnya kepada BUMN. BUMN harus siap dan tidak *melulu* memprioritaskan

permasalahan untung rugi. Dengan cara ini, saya yakin target swasembada pasti tercapai,” harap Rahmad.

Oleh karena itu, Rahmad mendorong adanya koordinasi dan sinergitas antar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan Komisi IV DPR RI demi mengulang kembali kesuksesan swasembada bawang putih seperti di tahun 1993.

“Kita harus yakin untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dan bukan hanya sekedar angan-angan. Karena kita pernah berhasil, pasti kita akan kembali mengulang kesuksesan seperti yang pernah kita raih sebelumnya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Temanggung Sudaryanto mengungkapkan permasalahan mendasar di sektor pertanian yang dialami oleh petani bawang putih yaitu terkait masalah pemasaran hasil, terutama harga komoditas bawang putih yang sangat fluktuatif.

“Saat ini harga bawang putih kering sampai dengan satu bulan terakhir menguntungkan bagi petani bawang putih dan memberikan semangat bagi petani untuk bercocok tanam. Namun ketika harga bawang putih sedang jatuh, para petani tentunya akan mengalami kerugian. Pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi dan proteksi harga, sehingga apabila harga bawang putih sedang turun petani tidak merasa dirugikan,” jelasnya.

Dalam mewujudkan swasembada bawang putih berkelanjutan di tahun 2021, selain kerja keras petani, Sudaryanto juga menilai harus adanya dukungan dari pemerintah. “Tentunya untuk menyukseskan program ini diperlukan koordinasi dan dukungan semua pihak. Dan tidak kalah penting yaitu kesiapan pemerintah dalam menyediakan benih bawang putih,” harapnya.

Saat ini harga bawang putih kering sampai dengan satu bulan terakhir menguntungkan bagi petani bawang putih dan memberikan semangat bagi petani untuk bercocok tanam

Kunjungan Kerja Panja Bawang Putih Komisi IV DPR RI ini turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR lainnya seperti, Siti Hediati Soeharto dan Agung Widyanoro (F-PG), Oo Sutisna dan Endro Hermono (F-Gerindra), serta Sulaeman L Hamzah (F-NasDem). ■ tra/sf



Foto: Singgih/hr

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis bersama Tim Kuncker meninjau proyek strategi nasional ruas Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi Segmen I di Sumatera Utara

Komisi V DPR Tinjau K2 Proyek di Sumut

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis melakukan peninjauan pembangunan proyek strategi nasional di Sumatera Utara yaitu Ruas Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi Segmen I dan Jalur Rel Ganda Kereta Api Layang Kualanamu - Bandar Khalifah - Medan, Kamis (19/4).

Fary menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung pengawasan keselamatan konstruksi pada pembangunan Jalur Rel Ganda Kereta Api Layang Kualanamu - Bandar Khalifah - Medan dan Ruas Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi Segmen I. Menurutnya pengawasan terhadap keselamatan konstruksi harus menjadi perhatian serius dalam pengerjaan proyek-proyek, jangan sampai mengejar target penyelesaian proyek sampai mengesampingkan keselamatan konstruksi (K2).

“Kita datang kemari ingin melihat secara langsung pengawasan keselamatan

konstruksi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Utara, walaupun proyek yang kita kunjungi tidak termasuk dalam moratorium keselamatan konstruksi oleh Kementerian PUPR, namun rekomendasi keselamatan konstruksi itu berlaku secara umum dalam pengerjaan proyek,” ungkapnya.

Kecelakaan-kecelakaan konstruksi yang terjadi di sejumlah proyek strategis nasional dan yang terakhir robohnya konstruksi *overpass* Tol Manado-Bitung harus menjadi pelajaran bagi pengerjaan konstruksi di lapangan, jangan sampai standar operasional yang sudah ditentukan itu dilanggar yang akhirnya

berakibat fatal.

Sebagaimana diketahui, Menteri PUPR telah menyampaikan kepada Komisi V DPR terkait dengan rekomendasi keselamatan konstruksi diantaranya pengetatan pelaksanaan standar operasional terhadap pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi.

“Kita telah berdiskusi dengan petugas K2 nya di sini, bahwa mereka telah melakukan upaya pengetatan-pengetatan untuk menjaga keselamatan konstruksi, jangan sampai apa yang telah disampaikan menteri tidak dilaksanakan di lapangan,” ungkapnya.

Dia juga sampaikan bahwa temuan-temuan di lapangan akan didiskusikan kembali dengan menteri terkait agar keselamatan konstruksi bisa berjalan hingga proyek-proyek yang dikerjakan selesai.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, pengerjaan proyek-proyek strategis nasional yang beresiko tinggi di Sumatera Utara harus terus meningkatkan dan memperhatikan keselamatan konstruksi, mulai dari petugas K2 nya, pengawasnya hingga masyarakat di sekitar pengerjaan proyek. ■ skr/sc



Foto: Arief/hr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dan Tim Kunker meninjau runtuhnya Jembatan Babat Widang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Komisi V Setuju Moratorium Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo setuju dengan moratorium pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Ia minta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membuat Perpres Dewan Insinyur Indonesia. Pasalnya, mau tidak mau dengan banyaknya proyek infrastruktur dibutuhkan banyak insinyur.

“UU No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran sudah ada, amanah kepada pemerintah untuk membuat dan membentuk Dewan Insinyur Indonesia, sekarang sudah tahun 2018 dan ada banyak proyek infrastruktur mestinya pemerintah melihat dahulu seberapa banyak Sumber Daya Manusia *Engineer* untuk pengerjaan banyaknya proyek,” ucap Sigit usai meninjau runtuhnya Jembatan Babat Widang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (19/4).

Politisi PKS ini mengaku, Komisi V sudah bertemu dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PPI) yang menyatakan Indonesia kekurangan 200 ribu insinyur. Kemampuan PPI untuk sertifikasi hanya 13 ribu per tahun. “Tanpa Dewan Insinyur Indonesia itu tidak akan berjalan,” katanya.

“Daripada membuat Perpres yang memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, lebih baik segera membentuk Dewan Insinyur Indonesia agar mekanisme rekrutmen, pelatihan Insinyur serta sertifikasi Insinyur Indonesia bisa berjalan baik,” papar legislator dari Jawa Timur ini.

Lebih lanjut ia menyatakan, insinyur kita di mata internasional akan sejajar karena bisa bersaing secara internasional karena mereka juga dilindungi oleh undang-undang. “Kita sudah punya undang-undang tetapi belum ada dewannya yang membuat program-program latihan yang membuat standar sertifikasinya,” tutupnya. ■ afr/sc

Investasi RRT Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berharap masifnya investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, mampu tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan Pemerintah RRT untuk menyerap tenaga kerja lokal, karena bagaimanapun penciptaan lapangan kerja turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

“Kami titip pesan, masuknya investasi Tiongkok cukup besar di Indonesia, dengan catatan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menggerus tenaga kerja lokal. Kami tidak menginginkan

investasi yang dimaksud baik, justru mendapatkan reaksi yang tajam dari masyarakat, hanya karena tidak meratanya pembagian pekerjaan yang sejatinya bisa dilakukan tenaga kerja lokal,” papar Satya usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang



Foto: Jayadi/hr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha



Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa usai beraudiensi dengan ratusan korban Sipoa Group bersama LBH Unair, dilanjutkan rapat dengan Kapolda Jawa Timur di Surabaya, Jatim, Kamis (19/4).

“Bupati Sidoarjo seperti tim *marketing*, tak seperti jadi bupati dan melakukan pembelaan pada korban Sipoa Group,” terang Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pihaknya sudah mendengar keluhan dari para pembeli dalam audiensi dengan paguyuban para korban yaitu P2S (Pembeli Proyek Sipoa) di Aula Fakultas Hukum, Kampus B Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut terungkap berbagai wanprestasi dan banyaknya anomali, mulai dari status tanah hingga cek penggantian yang tidak dapat dicairkan.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menjelaskan bahwa pihaknya siap dan membutuhkan dukungan dalam penanganan kasus ini.

“Kami ingin simpel, ada tersangka maka proses secara hukum, kami butuh *support* agar secara profesional menyelesaikan tanpa ada intervensi dari banyak pihak lain,” ujar Machfud.

Pihaknya berharap bahwa semua proses berjalan tanpa berbelit, baik proses hukum yang harus terus berjalan dan pengembalian dana sesuai tuntutan korban. ■ (ran/sf)

Komisi III Akan Panggil Pihak yang Terlibat Kasus Sipoa Group

Komisi III DPR RI berencana memanggil dan meminta penjelasan semua pihak yang terlibat kasus penipuan oleh pengembang properti Sipoa Group, termasuk Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.



Ketua Tim Kunker Desmond Junaidi Mahesa dan Anggota Komisi III DPR RI berdialog dengan paguyuban para korban Proyek Sipoa didampingi Kapolda Jawa Timur di Surabaya

Foto: Rizka/hr

Soesatyo menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Satya mengingatkan agar bebas visa kunjungan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah wisatawan Tiongkok, tidak disalahgunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

“Mereka datang ke Indonesia dengan bebas visa tidak ada negatifynya, kecuali apabila mereka datang ke Indonesia lantas mengurangi kesempatan kerja yang sejatinya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal, itu harus diatur pemerintah secara baik,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja perlu bersinergi dengan sektor teknis terkait, dalam menyeleksi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya di sektor migas, aturan teknis tenaga kerja asing

diatur oleh Kemenaker dan SKK Migas, sehingga penyerapan TKA diatur secara ketat.

“Kita berharap, industri yang lain juga menggunakan pola yang sama, sehingga pola seleksinya betul-betul berdasarkan keahlian dan *skill*,” jelas Anggota F-Golkar ini.

Satya menambahkan, Indonesia juga mendukung kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) atau jalur sutera modern Pemerintah RRT. Jalur Sutera modern ini mencakup lebih dari 60 negara, termasuk

Kementerian Tenaga Kerja perlu bersinergi dengan sektor teknis terkait, dalam menyeleksi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Indonesia untuk mewujudkan konektivitas antara Tiongkok dengan daratan ASEAN. Dengan saling terkoneksi, maka dapat mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia mendukung kebijakan *One Belt One Road* karena program yang dicanangkan ini melibatkan 60 negara yang terkoneksi dan mempengaruhi 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 75 persen sumber daya energi dunia,” tuturnya.

“Terakhir kita ingin pemerintah RRT bertanggung jawab terhadap realisasi 10 ribu MW yang ditenggarai mangkrak. Kita titip pesan kepada Dubes supaya disampaikan kepada investor yang mengerjakan proyek tersebut agar segera diselesaikan,” imbuah Satya. ■ ann/sf



Foto: Rumi/hr

Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ibnu Munzir meninjau proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang

Komisi V Nilai Pembangunan LRT Palembang Capai 98 Persen

Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ibnu Munzir meninjau proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan. Kunjungan ini guna melihat pelaksanaan proyek pembangunan serta progres pengerjaannya yang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dan PT. Waskita Karya (Persero) sebagai kontraktor.

Ibnu mengatakan, pihaknya ingin melihat pengerjaan, apakah sudah berjalan sesuai waktu. Pasalnya, LRT akan dioperasikan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, yang akan dimulai pada 18 Agustus 2018. Sehingga, tentunya ada batas waktu pengerjaan sesuai target selesai sebelum Agustus mendatang.

“Saya lihat pembangunan ini masih berjalan sesuai *on the track*. Progresnya sudah mencapai 98 persen, namun masih ada sedikit kendala yang harus bisa cepat diselesaikan. Oleh karena itu, kita meminta agar pembangunan ini bisa selesai sesuai target, dimana bulan Juni sudah bisa beroperasi,” ungkapnya

usai memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau proyek *trainset* LRT di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (19/4).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, proyek ini sebelumnya akan diuji terlebih dahulu secara keseluruhan, baik fasilitas maupun keretanya. Selain itu, seperti biasanya pada pembangunan lainnya, perlu ada *soft opening* atau semacam simulasi, yang akan dijadwalkan sebelum nantinya LRT tersebut beroperasi.

Ibnu menambahkan, dengan anggaran pembangunan LRT yang telah menelan anggaran lebih dari Rp10 triliun ini, pihaknya berharap infrastruktur ini digunakan secara benar, maksimal dan



betul-betul fungsional. Sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, bahwa LRT ini adalah fasilitas umum yang dimiliki masyarakat, sehingga harus dipelihara secara bersama-sama.

“Untuk itu, dengan adanya fasilitas LRT yang mahal ini juga diharapkan adanya nilai keuntungan yang luar biasa bagi Sumatera Selatan, yang tentu saja ujungnya investasi dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” harap Ibnu.

Politisi dapil Sulawesi Barat itu menambahkan, dari sisi keselamatan kerja ia menjelaskan bahwa keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) menjadi perhatian khusus. “Karena kita dapat data persentasi dari proyek-proyek kerja seperti ini, persentasi K3 agak cukup rendah, seperti halnya kita bisa lihat dari kejadian kecelakaan belakangan ini,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Palembang LRT adalah sistem transit kereta ringan untuk mendukung penyediaan angkutan massal dan perhelatan kompetisi olahraga Asian Games 2018. Lintas pelayanan LRT dimulai dari stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City.

Pembangunan LRT yang ditargetkan

beroperasi pada Agustus 2018 itu mempunyai 13 stasiun dan satu depo pengisian bahan bakar, halte terbesar ada di Asrama Haji. Panjang lintasan LRT tersebut mencapai 23,4 kilometer.

Dalam kunjungan kerja ini, Tim Komisi V DPR RI didampingi Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Palembang, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktur Jenderal Sarana Perkeretaapian, Kepala Balai Badan Pengelola Transportasi Darat, Direktur Operasi II Waskita dan Direktur Quality Health Safety Environment (QSHE). ■ rni/sf

PMA Penyelenggaraan Umrah Perlu Direvisi

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Umrah perlu direvisi. Banyak hal yang belum diatur, termasuk perlunya masa transisi bagi perusahaan atau travel umrah yang dicabut izinnya, yang mengakibatkan terlantarnya calon jemaah umrah.

☞ Dalam kaitan ini, Komisi VIII akan memanggil Dirjen Perjalanan Haji Umrah (PHU) dan Direktur Umrah Kementerian Agama secepatnya untuk membahas beberapa persoalan terkait umrah,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong usai menerima delegasi Aliansi Travel Muslim Indonesia (ATMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut Ali Taher, perusahaan umrah yang tergabung dalam ATMI masih banyak yang berstatus pra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Mereka sudah terdaftar, tetapi belum memiliki legalitas untuk menyelenggarakan umrah. Namun demikian, dari merekalah sumber jemaah, dari menghimpun, mendaftar, dan mencoba untuk memberangkatkan jemaah.

Kepada Komisi VIII, perwakilan ATMI menilai PMA itu sangat memberatkan, terutama bagi perusahaan yang saat ini tengah dalam proses pengurusan menjadi perusahaan PPIU. Ini sangat berdampak bagi Biro Perjalanan Wisata (BPW) pra PPIU yang telah memiliki rencana dan

jadwal pemberangkatan jemaah, bahkan sudah memiliki *booking* tiket pesawat serta *booking* penyewaan hotel di Makkah-Madinah.

“Kebijakan moratorium izin baru PPIU bukan solusi terbaik dalam membenahi PPIU nakal, malah sebaliknya akan mematikan bisnis umrah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapatkan mandat masyarakat. Moratorium akan berdampak besar bagi masyarakat yang tidak jadi berangkat umrah,” ucap Wakil Ketua ATMI Leni Noverita, yang membacakan pernyataan tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Ali Taher menyatakan ada beberapa rumusan yang diputuskan setelah menerima

Perusahaan umrah yang tergabung dalam ATMI masih banyak yang berstatus pra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Mereka sudah terdaftar, tetapi belum memiliki legalitas untuk menyelenggarakan umrah



Foto: Arief/hr

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

masuk ATMI, diantaranya umrah adalah bagian dari ibadah yang suci. Mengacu pada kasus-kasus yang terjadi, maka perlu ada solusi terbaik bagi pra PPIU ini, supaya di kemudian hari tidak ada masalah seperti *travel* lain yang bermasalah. Meski demikian, pra PPIU harus segera menyelesaikan aspek legalitasnya sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Komisi VIII juga meminta Kemenag supaya ada transisi antara PMA, jangan langsung di *cut-off*, sehingga bisa menyelesaikan jemaah yang sudah terdaftar dan membayar biaya umrahnya, paling tidak ada masa tertentu.

“Revisi PMA juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi yang berkembang seperti sekarang ini. Jangan sampai hanya ada 2-3 perusahaan *travel* yang bermasalah, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada perusahaan yang bagus,” tambahnya. ■

mp/sf

Saleh Daulay Sarankan Pembentukan Pansus TKA Dibicarakan Lintas Fraksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu di lintas fraksi yang ada di DPR. Usulan pembentukan pansus sebagai tanggapan terhadap terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Terkait usulan Pansus tersebut, saya kira bisa ditindaklanjuti dengan membicarakan dengan lintas fraksi dan komisi di DPR,” kata Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlemenaria, Minggu (22/4).

Dia mengingatkan agar niat Pansus ini harus tetap untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia. “Bahkan, Pansus itu nanti sekalian saja mengusut penggunaan TKA yang konon banyak terjadi di proyek-proyek investasi asing di daerah. Pemerintah tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada, kan Pansus ini sendiri nanti yang menjelaskan ke publik bahwa TKA itu tidak ada,” ungkap Saleh.

Saleh juga mengungkapkan, persoalan TKA sebenarnya sudah menjadi perhatian serius Komisi IX, yang membidangi ketenagakerjaan.

Bahkan, pada 2016 yang lalu, Komisi IX telah membentuk Panja untuk meneliti keberadaan TKA yang konon kabarnya banyak bekerja di berbagai pelosok Tanah Air. Selain itu, Saleh menganggap terbitnya Perpres TKA kontraproduktif dengan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) TKA yang telah dibentuk Komisi IX DPR pada 2016.

“Kelihatannya, rekomendasi Panja



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

itu belum maksimal dilaksanakan. Malah terkesan aneh jika kemudian Presiden mengeluarkan Perpres No. 20 Tahun 2018. Komisi IX meminta tingkatan pengawasan, pemerintah malah memberikan kemudahan,” tandas Anggota Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Panja yang dibentuk pun telah

menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya secara resmi telah diserahkan kepada pemerintah. Ada lima rekomendasi Panja TKA yang telah diserahkan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kedua, mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ketiga, penerapan tindakan tegas bagi semua tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan penerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal.

Keempat, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Setidaknya, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan serta alih pengetahuan,” papar Saleh.

Kelima, mendesak pemerintah agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia. ■ **eko/sf**

Komisi X Dorong Kemenpar Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata agar melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan, tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi bagaimana meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata. Hal ini untuk mencapai target wisatawan mancanegara (wisman) dan penerimaan devisa pariwisata tahun 2019.

“Perlu juga adanya peningkatan pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi sumber utama penghasilan devisa negara. Karenanya,

Kemenpar perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan kepariwisataan,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin rapat kerja dengan Menteri

Pariwisata Arief Yahya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Dijelaskan Djoko, pada tahun 2017 sektor pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak sawit mentah (CPO), mencapai Rp203 triliun. Bila merujuk pada cadangan devisa per akhir Desember 2017 sebesar Rp1.744 triliun, maka devisa pariwisata berkontribusi sebesar 11,64 persen.

“Devisa pariwisata harus menjadi nomor satu pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp280 triliun. Untuk itu, pemerintah harus memanfaatkan data yang disajikan oleh

UMKM Penerima KUR Butuh Pendampingan

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami stagnasi. Menurutnya, wirausaha mikro perlu ditopang dengan pembinaan, sehingga usahanya bisa naik kelas dan berdaya saing. Hal ini juga menjadi semangat RUU Kewirausahaan Nasional yang tengah dibahas di DPR.

“Mereka membutuhkan pendampingan bukan hanya pembukuannya, terutama pembinaan dalam segi manajemen,” ungkap Andreas di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI ke nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini.

Ia memaparkan, pembinaan menjadi alasan penting dalam meningkatkan daya saing dan terwujudnya usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah, sekitar 70-80 persen pelaku usaha mikro dan UKM mengalami kegagalan, lantaran tidak adanya pendampingan, baik dari pemasaran hingga kemitraan.

“Perbankan bisa berbuat banyak, karena bisa mempertemukan pelaku usaha dari industri hilir sampai ke hulunya. Misalnya, industri ikan bandeng yang kita tinjau, jadi mulai dari bahan baku sampai kepada pembeli atau *offtaker*-nya,” papar Andreas.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam hal ini perbankan mempunyai peran penting dalam mewujudkan *supply chain* atau rantai pasok industri dari hulu ke hilir. Sementara itu dari sisi pembiayaan, diharapkan pendampingan bisa dilakukan secara langsung sehingga

Usaha mikro ini tidak hanya butuh dukungan permodalan, tetapi juga teknologi inovasi tata kelola dan dukungan teknis dari bank-bank sebagai kreditur

dana KUR bisa tepat sasaran.

“Kita juga harapkan bunga KUR yang mencapai 7 persen dengan harapan dana KUR bisa tepat sasaran, bukan hanya yang sudah besar saja, terutama KUR mikro itu bisa mewujudkan terciptanya usaha-usaha baru,” tandasnya.



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo

Foto: Doeh/hr

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo. Ia mengatakan, sektor KUR harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Seperti pelatihan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi untuk menekan biaya produksi.

“Usaha mikro ini tidak hanya butuh dukungan permodalan, tetapi juga teknologi inovasi tata kelola dan dukungan teknis dari bank-bank sebagai kreditur, karena mempunyai akses langsung ke sektor ekonomi riil,” imbuhan Harry. ■ ann/sf



Ketua Komisi X DPR RI Joko Udjiyanto

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan laporan *World Economic Forum* 2017 bahwa wisman akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan kunjungan per tahun sebesar 3,3 persen,” jelasnya.

Foto: Naefuroji/hr

Selain itu, menurut Anggota Dewan F-Demokrat ini, pemerintah juga perlu menyiapkan ekosistem pariwisata, infrastruktur, dan tata kelola yang lebih baik, agar sektor pariwisata dapat terus tumbuh menjadi kontributor pergerakan ekonomi.

“Kami mengusulkan yang perlu ditingkatkan antara lain program sadar wisata, 10 pemasaran pariwisata prioritas, destinasi wisata Batam, even Asian Games 2018, pertemuan tahunan IMF 2018 di Bali, hingga Taman Mini Indonesia Indah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan perolehan devisa sektor pariwisata menunjukkan tren positif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2015 perolehan devisa sebesar Rp12 miliar dolar AS, dan tahun 2016 sekitar Rp13 miliar dolar AS.

“Di era digital, pendekatan pemasaran pariwisata tidak hanya mengandalkan *high tech* tetapi juga memberikan sentuhan *humanis*. Kunjungan wisman ke Indonesia menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah wisman adalah 14.039.799 kunjungan,” jelasnya.

Sementara dalam perkembangan kepariwisataan Indonesia, *branding* Wonderful Indonesia mendapat 29 penghargaan di 8 negara di awal tahun 2018. Indonesia berhasil naik 1 peringkat menjadi peringkat ke-2 dalam *Global Muslim Travel Index* 2018. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih 3 penghargaan pada acara *Global Destination Marketing Summit* dan *World Culture and Tourism Forum* 2018. ■ rnm/sf

Penggunaan AIS Butuh Payung Hukum

Penggunaan *Automatic Identification System* (AIS) membutuhkan payung hukum, dalam menunjang penegakan hukum di perairan Indonesia. Hal tersebut terkait dengan maraknya modus baru kejahatan di wilayah perairan Indonesia yang melibatkan angkutan kapal laut. Dengan adanya payung hukum untuk mengaktifkan AIS, dapat membantu aparat menjaga perairan Indonesia.



Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno

“Selain meringankan tugas penegakan hukum di perairan Indonesia, AIS juga efisien dan memudahkan aparat Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga perairan Indonesia untuk memantau pergerakan dan aktifitas angkutan laut. Kebutuhan atas payung hukum dalam penggunaan AIS sudah menjadi keharusan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno saat mengunjungi Armada Laut Kepulauan

Riau dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI, baru baru ini.

Meskipun Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut telah mewajibkan kapal-kapal untuk selalu menghidupkan AIS-nya saat operasional, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran seperti yang dikemukakan petugas Bea Cukai kepada Tim Kunsker Komisi XI.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, banyak kapal yang begitu memasuki perairan Indonesia, walaupun peralatan dan sistemnya AIS ada, namun AIS dimatikan. Sehingga pihak Bea Cukai dan aparat terkait lainnya tidak bisa memonitor pergerakan dari kapal-kapal tersebut.

“Payung regulasi yang mewajibkan kapal yang keluar masuk di perairan Indonesia untuk selalu menghidupkan AIS, nanti akan kita angkat di DPR dengan pihak-pihak terkait, ini salah satu temuan yang penting buat kita,” komitmen Jeno usai meninjau kondisi lapangan, dengan didampingi sejumlah mitra kerja.

Automatic Identification System (AIS) adalah sebuah sistem pelacakan otomatis digunakan pada kapal dan dengan pelayanan lalu lintas kapal (VTS) untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran data dengan kapal lain di dekatnya, BTS AIS, dan satelit.

Dalam kesempatan itu, Jeno juga memberikan apresiasi kepada Bea Cukai Batam yang beberapa waktu lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan sabu kurang lebih 1,6 ton menuju Indonesia melalui wilayah perairan Kepri.

“Meski banyak pekerjaan rumah, kami tetap mengapresiasi terhadap Bea Cukai Batam yang beberapa waktu belakangan ini melakukan pencegahan dan bahkan penangkapan terhadap penyelundupan sabu dalam jumlah yang luar biasa. Itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa,” apresiasi politisi dapil Kalbar itu.

Diharapkan prestasi ini menjadi pelecut semangat dalam mencapai prestasi lainnya. Di ujung pertemuan, Komisi XI siap mendukung segala hal yang diperlukan, agar Bea Cukai mampu meningkatkan kinerjanya.

■ doe/sf

Foto: Doelvi/hr

Parlemen Efektif Sosialisasikan Antikorupsi

Parlemen memegang peran penting dalam mengampanyekan aksi antikorupsi, sebagai salah satu lembaga negara. Parlemen begitu strategis mengambil peran ini, karena di dalamnya ada banyak partai politik bernaung. Di parlemen juga desain regulasi antikorupsi dirumuskan.

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyampaikan itu kepada Parlementaria usai mengikuti *Workshop*

Antikorupsi yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4). Acara ini juga merupakan kampanye strategis



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

Foto: Rumi/hr



Penyaluran KUR Harus Dibenahi

Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar mengatakan, masih ada permasalahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Menurut Willgo, salah satunya adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.

“Ada yang sudah mendapat KUR Rp500 juta untuk investasi dan ada yang masih bertahap menuju Rp100 juta. Mereka usahanya *visible*, tapi belum *bankable*,” ungkap Willgo di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI meninjau implementasi penyaluran KUR kepada kelompok usaha persablonan dan sepatu kulit di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (20/4).

Anggota DPR Fraksi Gerindra itu menilai, perlu ada peran Pemerintah Desa agar permasalahan administrasi tersebut tidak menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan KUR. Masalah lainnya yaitu belum tumbuhnya rasa percaya diri masyarakat maupun rasa kepercayaan perbankan terhadap masyarakat.

“Harus ada timbal balik. Perbankan harus menjemput bola, mendatangi sekelompok usaha yang memang dianggap *visible*. Selain itu, masyarakat juga harus mempersiapkan diri bahwa KUR ini sifatnya adalah pinjaman, sehingga masyarakat dapat memiliki nilai produktif yang baik agar dapat mengangsur dengan tepat waktu,” papar Willgo.

Selain itu, dibutuhkan peran perbankan agar dapat turun langsung memberikan sosialisasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai KUR. “Perbankan harus langsung mengeksekusi. Jangan menunggu masyarakat yang datang ke perbankan. Perbankan harus membantu seluruh proses administrasi, bahkan hingga proses pencairan dana,” jelas Willgo.



Anggota Komisi DPR RI Willgo Zainar

Foto: Doeh/itr

Willgo optimis, KUR dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian, khususnya perekonomian kerakyatan yang berbasis industri usaha kreatif. “Saya kira Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Bali yang menjadi salah satu penyalur KUR, sudah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kuantitas penyaluran KUR,” nilai Willgo.

Willgo berharap, program KUR dapat terus berjalan dengan baik, namun perbankan dapat lebih selektif. “Jangan misalnya orang yang memiliki kemampuan kredit komersial diarahkan ke KUR, sementara yang membutuhkan KUR justru kesulitan mengaksesnya. Diharapkan ke depannya, volume KUR dapat meningkat dan suku bunga dapat lebih rendah lagi,” harap Willgo.

Willgo juga berharap, kelompok-kelompok usaha kecil nantinya dapat meningkat menjadi kelompok usaha menengah. Tidak hanya itu, UMKM pun diharapkan dapat mengikuti kemajuan teknologi.

“Kami berharap ada pengembangan usaha, baik dari segi manajemen maupun akses pemasaran, misalnya pemasaran melalui *online*. Jadi, harus ada peningkatan, apalagi Bali terkenal sebagai ikon industri kreatif rumah tangga dan ekonomi kerakyatan,” harap Anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara, menemukan permasalahan dalam penyaluran KUR di Bali. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR bahwa KUR Mikro (di bawah Rp 25 juta) seharusnya tidak dikenakan agunan berupa apapun.

“Kita dapatkan secara tersirat bahwa pihak perbankan masih meminta agunan dalam bentuk lain-lain. Padahal, sesuai kesepakatan DPR dengan pemerintah, KUR Mikro tidak boleh dikenakan agunan, yang penting ada kelayakan usaha,” ungkap politisi PPP itu.

Anggota DPR dapil Sulsel itu memastikan, temuan-temuan dalam tinjauan lapangan terhadap nasabah KUR di Provinsi Bali ini akan dibawa ke dalam rapat kerja DPR bersama Menko Perekonomian, untuk dievaluasi agar pemberian KUR dapat sesuai dan tepat sasaran. ■ ica/sf

antikorupsi kepada publik. Acara ini dihadiri GOPAC, UNDP, *Islamic Development Bank*, dan para Anggota DPR RI.

“Sosialisasi antikorupsi oleh parlemen selalu dilakukan. Contohnya acara yang dihadiri GOPAC ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi. Parlemen juga sudah bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mensosialisasikan bahaya tindak pidana korupsi,” kata Imam.

Ditambahkannya, kini DPR sedang merumuskan revisi UU Tipikor untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua klausul yang belum dimasukkan menyangkut tindak pidana korupsi akan

segera dimasukkan dalam agenda revisi UU Tipikor. Dengan begitu pemberantasan korupsi bisa lebih holistik dan menyentuh semua elemen bangsa.

“Parlemen terus memantau bagaimana kemajuan Indonesia agar tertib hukum, meminimalisir korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara, dan menutup semua celah kebocoran anggaran,” imbuh Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI itu.

Pada bagian lain, politisi dari dapil Jateng III itu, berpendapat bahwa pendanaan partai politik di Indonesia penting diberikan oleh negara. Anggaran Parpol ini penting untuk kemajuan demokrasi dan pendidikan politik.

Parpol sebagai kendaraan untuk masuk ke koridor kekuasaan perlu dibiayai negara. Di negara-negara demokratis lainnya, negara mengalokasikan anggaran khusus untuk perkembangan Parpol. “Seperti di Meksiko, pendanaan Parpol sangat tinggi. Ini penting mengurangi korupsi. Parpol butuh dana untuk sosialisasi ke masyarakat. Pendanaan jangan kurang dan jangan pula berlebihan. Standarnya mengacu pada perhitungan suara masing-masing Parpol dalam Pemilu,” tutup Imam.

■ mh/sf

Kesetaraan Gender Penting untuk Jabatan Publik

Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam mengisi jabatan-jabatan publik sebagai bagian dari kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di jabatan pimpinan parlemen, baik MPR, DPR, dan DPD perlu ada kursi untuk perempuan, sehingga tercipta keseimbangan peran antara pejabat publik laki-laki dan perempuan.



Foto: Rumi/hr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota BKSAP

“Ketika perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, maka *good for women good for all*. Perempuan selalu berpikir tentang dirinya sendiri paling akhir,” ucap Ketua Badan Kerja Sama

Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, saat memberi sambutan pada *workshop* tentang TPB dan konvensi PBB antikorupsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Banyak capaian yang sudah dilakukan parlemen dalam mengejar TPB. Namun, yang masih sulit, kata Nurhayati, mengejar *gender equality* atau kesetaraan gender pada jabatan publik. Tidak hanya pada level pimpinan parlemen, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau komisi-komisi juga perlu diisi perempuan.

“Yang sudah dilakukan DPR RI membuat berbagai macam peraturan untuk mengawal legislasi dan anggaran. Kami selalu melihat apakah anggaran di setiap komisi sudah *inline* dengan target SDG’s. Yang belum tercapai adalah pimpinan DPR, MPR, dan DPD diisi perempuan,” ungkapnya.

BKSAP sendiri, lanjut politisi Partai Demokrat ini, sudah membentuk Panja TPB yang setiap tahun memberi rekomendasi kepada pemerintah. Untuk efektifitas mencapai TPB, pemerintah diimbau menggunakan Bahasa Indonesia dan lokal agar mudah dipahami oleh Pemda dan rakyat Indonesia. TPB ini punya 17 goals, 169 target, dan 241 indikator.

“Kita minta pemerintah menggunakan bahasa nasional dalam TPB. Kami juga mengimbau pemerintah daerah supaya menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” harapnya lebih lanjut. ■ mh/sf

Ittama DPR Submit Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan *submit* hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI, dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan BK DPR RI.

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, penilaian mandiri reformasi birokrasi ini meliputi delapan area perubahan yang meliputi, manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

“Keseluruhan penilaian tersebut dilaksanakan oleh tim *assessor* yang didampingi oleh asisten *assessor* serta auditor dan dikoordinasikan oleh Ittama DPR RI,” jelas Totok, panggilan akrab Setyanta, usai melaksanakan rapat tim

evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Totok mengungkapkan 8 area perubahan yang dinilai, nantinya akan diuji dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Apabila penilaian yang diperoleh tinggi, akan berpengaruh pada peningkatan tunjangan kinerja.

“Dari penilaian yang telah dilakukan diperoleh angka 82,65 persen, nilai ini jauh lebih meningkat dibanding tahun



Legislator Minta PPAK Bekukan Aliran Dana LSM

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan aliran dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbukti menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri. Khususnya LSM yang mendapatkan aliran dana dari Uni Eropa.



Foto: Naefuroji/hr

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf didampingi Anggota BKSAP DPR RI Fadel Muhammad berbincang sebelum memberikan keterangan Pers

Menurut Fadel, para LSM itu harus ditindak tegas atas sikapnya menjelek-jelekkan industri minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa. Apalagi sejumlah LSM asal Indonesia itu menyebutkan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri merusak lingkungan.

“Semua makin runyam setelah LSM tersebut menyampaikan informasi yang

tidak benar terkait kelapa sawit kita di Indonesia,” kata Fadel kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Politisi Partai Golkar itu mengaku sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada PPAK, dan dirinya diminta menyiapkan surat-surat, dan PPAK akan menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Uni Eropa itu.

2017 lalu dengan nilai sebesar 71,05 persen. Artinya ini ada pada predikat B atau Baik Sekali. Dengan kenaikan ini kita harapkan nantinya bisa stabil, sehingga kita bisa mengajukan tambahan peningkatan tunjangan kinerja yang sekarang ini masih 70 persen, nanti bisa meningkat menjadi 80 persen,” ungkap Totok.

Lebih lanjut Totok menambahkan, perolehan nilai tersebut nantinya akan diuji dan dievaluasi oleh KemenPAN-RB pada tanggal 30 April 2018 berdasarkan kaidah atau bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam penilaian reformasi birokrasi. “Pengalaman selama ini, kita memang ada deviasi arahnya turun. Tapi paling tidak kita tetap optimis penilaian setiap tahun semakin meningkat,” imbuhnya. ■ tra/sf



Foto: Arief/hr

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha

“Dan kita bisa blok mereka siapa saja yang terima uang. Kita harus tegas dengan mereka. Dana yang beredar di Indonesia dari kelompok-kelompok mereka sangat besar sekali. Ini harus dihentikan dan ditangkap,” sambung Fadel.

Gubernur Gorontalo dua periode itu menjelaskan, resolusi Uni Eropa itu sangat merugikan 50 juta rakyat Indonesia yang bergantung kepada kelapa sawit, termasuk para petani dan buruh. Menurutnya, Resolusi Parlemen Uni Eropa itu diskriminatif, akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indonesia. Apalagi dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar.

“Saya menemukan tiga hal terkait sikap LSM ini. Pertama, ternyata yang mempublikasi informasi-informasi yang tidak baik soal Indonesia di luar negeri, adalah LSM yang telah dibayar ini. Mereka dibayar untuk kepentingan bisnis dan politik di Eropa. Mereka telah menggadaikan nama baik Indonesia di luar negeri, dengan mencederai nasib rakyat yang bekerja di industri kelapa sawit Indonesia,” papar Fadel.

Fadel menjelaskan, kampanye hitam yang terus dilancarkan oleh LSM terhadap produk sawit Indonesia harus dilawan, khususnya di negara Eropa. “Kita harus buat balasan kampanye, kita harus lawan mereka. Kita harus bersatu melawan mereka. Kampanye dilawan kampanye,” ujarnya.

Untuk itu, Fadel bersama Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), dan sejumlah Anggota BKSAP DPR RI diantaranya Aryanto Munawar (PKB), Saiful Rasyid (Gerindra), Abdul Latief Hanafiah (PKB), dan Soehartono (NasDem) segera melaporkan perihal LSM tersebut ke PPAK dan Presiden Joko Widodo.

Untuk diketahui, resolusi *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) yang diajukan Parlemen Uni Eropa didasarkan atas tuduhan bahwa pengembangan industri kelapa sawit asal Indonesia menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.

Itu dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*). Dimana resolusi Eropa itu bertujuan akhir agar minyak sawit yang produsen terbesarnya adalah Indonesia, tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa di 2020. Karena industri kelapa sawit dianggap sebagai pemicu utama deforestasi. ■ tn/sf

Penguatan BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisi VI DPR RI sebagai pengusul RUU ini menyampaikan, RUU BUMN bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto berjabat tangan dengan Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto

Foto: Azka/hr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito

Ganinduto sebagai Ketua Panja dari Komisi VI menegaskan, penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

“BUMN ini kaitannya langsung kepada masyarakat, kita akan memperkuat BUMN ini sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi BUMN yang kuat

bermanfaat untuk masyarakat,” papar Dito di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar ini memberikan contoh, BUMN yang langsung bersentuhan dengan rakyat seperti BUMN yang bertanggung jawab pada ketersediaan pangan.

“Kan banyak BUMN yang menangani tentang pangan, yang berkaitan dengan persoalan kerakyatan secara langsung. Banyak hal yang harus kita berikan dukungan, sehingga BUMN ini menjadi mandiri dan kuat, besar seperti BUMN di negara-negara lain,” jelas Dito.

Karena sesuai dengan konstitusi, negara bertanggung jawab menyelenggarakan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Selain itu Dito juga menjelaskan, secara garis besar melalui RUU ini, DPR akan memperkuat BUMN, disamping itu juga akan memberikan keleluasaan kepada BUMN untuk menjalankan usahanya secara profesional. Menurutnya, dalam RUU BUMN ini DPR juga akan

Sektor e-Commerce Tumbuh Pesat

Pertumbuhan sektor transaksi *online* atau *e-commerce* di Indonesia cukup bagus dan menjadikan *e-commerce* sebagai sektor ekonomi yang paling strategis dan mengalami pertumbuhan yang pesat saat ini. Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia tidak lepas dari antusiasme masyarakat untuk berbelanja dan berjalan secara *onlineserta* infrastruktur yang mendukung gerakan *e-commerce* pun semakin stabil dan memudahkan masyarakat.



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat membuka e-Commerce Indonesia

Foto: Arief/hr

bahwa perdagangan Indonesia akan sangat ditopang oleh teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, *e-commerce* bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah mulai dikembangkan,

“Ke depan, penggunaan *e-commerce* akan semakin berkembang, ditambah lagi jika ada undang-undang yang mengatur pembatasan-pembatasan transaksi tunai, secara positif pasti akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Johnson.

Johnson juga berharap penggunaan *e-commerce* terus dilakukan sosialisasi, karena secara sosialogis apakah masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah siap menggunakan *e-commerce* atau belum. Hal ini tentu perlunya kebijakan-kebijakan semacam pengecualian bagi

Hal itu ditekankan Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat membuka Seminar *e-Commerce* Indonesia: ‘Perkembangan, Tantangan, Hambatan Serta Pengaruhnya

Terhadap Perekonomian Nasional dan APBN Indonesia’ di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Johnson menyampaikan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka tidak dipungkiri



Kita akan meningkatkan pengawasan dari pihak DPR kepada BUMN tersebut, karena BUMN ini kan sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia

meningkatkan pengawasannya terhadap kinerja BUMN.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dari pihak DPR kepada BUMN tersebut, karena BUMN ini kan sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia, kira-kira itu yang secara garis besar,” ungkap Dito.

Selanjutnya Dito menjelaskan, RUU BUMN akan dikirim kepada Badan Musyawarah DPR (Bamus) untuk disampaikan kepada Ketua DPR, agar nanti kalau sudah selesai bisa diparipurnakan, sehingga setelah itu akan dikirim kepada Presiden.

“Kemudian dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah mengenai Undang-Undang BUMN yang baru. Jadi ini bukan revisi, tapi hampir dikatakan Undang-Undang BUMN yang baru,” ujar Dito. ■ eko/sf

masyarakat yang belum secara penuh memanfaatkan *e-commerce* tersebut.

“Perbedaan-perbedaan inilah yang perlu terus kita diskusikan kembali, agar sisi-sisi positif dari penggunaan *e-commerce* itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagaimana data dari laporan tahunan yang dikeluarkan *We Are Social* menunjukkan, persentase masyarakat Indonesia yang membeli barang dan jasa secara *online* dalam kurun waktu sebulan di 2017 mencapai 41 persen dari total populasi, meningkat 15 persen dibanding tahun 2016 yang hanya 26 persen.

Data pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia menunjukkan pada tahun 2011 sebesar Rp13,5 triliun (Bank Indonesia, Katadata). Nilai tersebut terus merangkas naik menjadi Rp47 triliun pada tahun 2015, Rp75 triliun pada tahun 2016.

“Kita juga berharap pemerintah segera memperkuat regulasi penggunaan *e-commerce* ini, terutama perlindungan data bagi para pengguna agar mereka juga nyaman menggunakan *e-commerce* tersebut,” harap Johnson. ■ skr/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat acara Festival dan Diskusi Teh, Kopi, dan Coklat Produk Petani Indonesia di Gedung DPR RI

Foto: Runi/hr

Komisi X Minta Pemerintah Hati-hati Impor Dosen

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana melaksanakan kebijakan impor dosen. Melihat hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, kebijakan mengimpor dosen ini seperti dua sisi mata pisau.

“Satu sisi, mungkin kita mau menjiplak bagaimana pergururan tinggi dan dosen-dosen luar negeri yang memiliki kompetensi penelitian yang baik, dan mau diadopsi di Indonesia. Tetapi di sisi lain, mereka masuk harus ada aturan main. Jangan mereka masuk tidak menghargai bagaimana negara besar seperti Indonesia, dalam kaitan pentingnya NKRI,” kata Sutan di sela-sela acara Festival dan Diskusi Teh, Kopi, dan Coklat Produk Petani Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Hal yang dimaksud Sutan adalah adanya kekhawatiran jika dosen-dosen asing itu memanfaatkan momentum selama mengajar di Indonesia untuk menciptakan Indonesia tidak memiliki jati diri yang sebenarnya. Termasuk adanya kekhawatiran jika dosen itu melakukan penelitian di Indonesia, tapi justru hasilnya dibawa ke negara asalnya atau negara lain. Menurutnya, hal itu sudah pernah terjadi di Aceh.

“Oleh karena itu, terhadap impor dosen ini artinya perlu dibicarakan secara mendalam dan harus dibuat aturan main yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan kisruh, termasuk juga dengan dosen yang ada di dalam negeri,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Sutan menambahkan, jika ingin sekadar ingin membandingkan kualitas pendidikan tinggi antara Indonesia dengan negara lain, bisa dengan seminar. Tidak perlu sampai mengajar tetap. Di sisi lain, Sutan menilai, Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tak kalah dengan dosen dari luar negeri. Bahkan menurutnya jumlah doktor dan profesor di Indonesia sudah cukup memadai. Daripada impor, kata Sutan, lebih baik pemerintah mengoptimalkan SDM yang ada.

“Coba dioptimalkan dulu. Jangan sedikit-sedikit impor. Cintailah produk dalam negeri. Saya menitikberatkan, impor dosen ini perlu kehati-hatian, perlu regulasi yang jelas dan perlu pengamanan terhadap NKRI, karena ini menyangkut masalah pendidikan,” pesan politisi dapil Jambi itu. ■ sf



Foto: Ryan/hr

Tim Kunker Komisi VII DPR RI berdialog dengan penambang saat meninjau lokasi pertambangan liar di Wilayah Poboya, Palu, Sulawesi Tengah

Komisi VII Upayakan Solusi Terbaik Bagi Penambang Poboya

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI didatangi sejumlah massa penambang yang ingin menyampaikan aspirasinya saat meninjau lokasi pertambangan liar di wilayah Poboya, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka menuntut agar penambangan yang menjadi mata pencaharian selama ini tidak ditutup. Terkait hal tersebut, Komisi VII akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

“ Kita telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, terkait adanya penambangan ilegal. Aspirasi mereka sederhana, yaitu ingin agar lapangan kerja mereka tetap ada, dan diakomodir melalui undang-undang. Namun tetap dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada di dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Wakil Ketua Komisi VII

DPR RI Tamsil Linrung di Palu, Sulteng, Rabu (25/4).

Anggota Dewan F-PKS ini menambahkan, kemudian perlu dipikirkan masalah teknisnya, apakah koordinat Taman Hutan Rakyat yang digeser, atau dialihkan ke satu lokasi lain. Sehingga ada satu lokasi sebagai wilayah pertambangan rakyat. Hal itu nanti akan dikoordinasikan saat rapat kerja dengan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ESDM.

“Berdasarkan temuan-temuan kami di lapangan dan masukan dari pemerintah daerah setempat, dapat saya simpulkan bahwa akan ada solusi terbaik yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semuanya. Termasuk bagi rakyat yang menginginkan kesejahteraan terpenuhi,” optimisnya.

Tamsil menyampaikan bahwa saat ini telah ada teknologi untuk mengganti penggunaan merkuri dan sianida yaitu dengan memakai bakteri. “Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, nantinya dapat menghindari pemakaian merkuri dan sianida yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan,” tutupnya.

■ dep/sf



Pimpinan DPR memberikan selamat kepada sembilan calon Anggota KPPU terpilih masa jabatan 2017-2022 pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4) Foto: Jayadi-Rumi/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Perwakilan Ojek Online di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4). Foto: Naefuroy/hr



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Teraskita, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (25/4) foto:doeh/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

mau motor jaman now? IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA: 19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: MOTOR JAMAN NOW

Juara I Rp 10 juta, Juara II Rp 7 juta, Juara III Rp 5 juta

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN
LOMBA
STAND UP COMEDY

KIRIM KE:



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)